

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya mencari solusi pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas bagi para peneliti dan penyusun kebijakan, dengan tujuan akhir untuk memajukan kesejahteraan hidup masyarakat (Bent, 2018). Pandemi Covid-19 telah merusak upaya pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan sedemikian rupa pada negara berkembang. Berdasarkan data dari Bank Dunia diperkirakan sekitar 97 Juta orang berada di bawah garis kemiskinan akibat pandemi, sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan global dari 7,8% menjadi 9,1 %. Secara global pihak Bank Dunia menyimpulkan bahwa kemajuan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem selama empat hingga lima tahun tidak memberikan secara signifikan. Penelitian sudah membuktikan bahwasanya kemiskinan hanya bisa dihentikan jika masyarakat sudah dilengkapi dengan sumberdaya yang cukup dan memadai agar dapat dengan segera memutar roda perekonomian untuk meningkatkan pendapatan seperti sektor pertanian skala kecil, usaha kecil dan menengah (UMKM) dan perdagangan tunggal (Khan et al., 2021).

Kemiskinan menurut Bank Dunia merupakan fenomena yang berhubungan dengan penurunan kesejahteraan seperti rendahnya pendapatan dan ketidakmampuan memperoleh kebutuhan barang dan jasa dasar yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup yang bermartabat. Kondisi kemiskinan tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi, tetapi juga tercermin dari buruknya kondisi kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses ke fasilitas air bersih dan sanitasi, minimnya jaminan keamanan, serta terbatasnya kesempatan untuk mengembangkan diri (Chikwira et al., 2022). Seseorang dikatakan mengalami kemiskinan ekstrem jika berada pada kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan hanya mampu membiayai hidup tidak lebih dari USD 1,9 per harinya. Menurut data dari Bank Dunia yang dirilis pada bulan Juli 2023, diperkirakan jumlah manusia yang mengalami kemiskinan ekstrem adalah 689 juta orang dengan rasio 9,3% dari populasi global.

Perhitungan statistik kemiskinan di Indonesia dimulai oleh BPS pada tahun 1984, yang mencakup data Susenas Modul Konsumsi periode 1976-1981. Sejak saat itu, BPS terus mempublikasikan data statistik penduduk miskin secara berkala dengan membedakan antara area urban dan rural. Dalam metodologi pengukurannya, BPS menggunakan *basic needs approach*, di mana kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang ditetapkan berdasarkan garis kemiskinan. Seseorang diklasifikasikan sebagai miskin apabila pengeluaran rata-rata per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kemiskinan mengalami perkembangan signifikan dengan diperkenalkannya *Multidimensional Poverty Index* (MPI) pada tahun 2010, yang menawarkan indikator yang lebih komprehensif dalam menilai kondisi kemiskinan. IKM, yang merupakan hasil kolaborasi antara *Oxford Poverty and Human Initiative* (OPHI) dan *United Nation Development Program* (UNDP), memberikan gambaran kemiskinan yang lebih menyeluruh dibandingkan pengukuran berbasis moneter yang diterapkan Bank Dunia dan Indonesia. Metode pengukuran IKM ini kemudian mulai diadaptasi oleh berbagai negara di dunia (Prakarsa, 2013).

Amartya Sen memberikan kritik terhadap pendekatan pengukuran kemiskinan yang hanya berfokus pada aspek moneter. Dalam pandangannya (Sen, 1999), pendekatan ini hanya mencakup sebagian kecil dari kompleksitas masalah kemiskinan. Fenomena kemiskinan harus dipandang secara lebih komprehensif, melampaui sekadar indikator ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, atau kemampuan membeli, karena mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya. Misalnya, jika ada kelompok masyarakat yang tidak mampu mengakses layanan pendidikan atau kesehatan dasar karena kendala ekonomi, mereka dapat dikategorikan sebagai miskin. Demikian pula, kondisi standar hidup seperti lantai rumah dari tanah atau penggunaan sumber energi yang tidak memadai untuk penerangan dan memasak juga mencerminkan kemiskinan.

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) menurut OPHI sebenarnya tidak menghilangkan unsur moneter di dalamnya, akan tetapi memberikan pandangan lebih luas dan terukur dalam menjelaskan segala aspek kemiskinan (PRAKARSA,

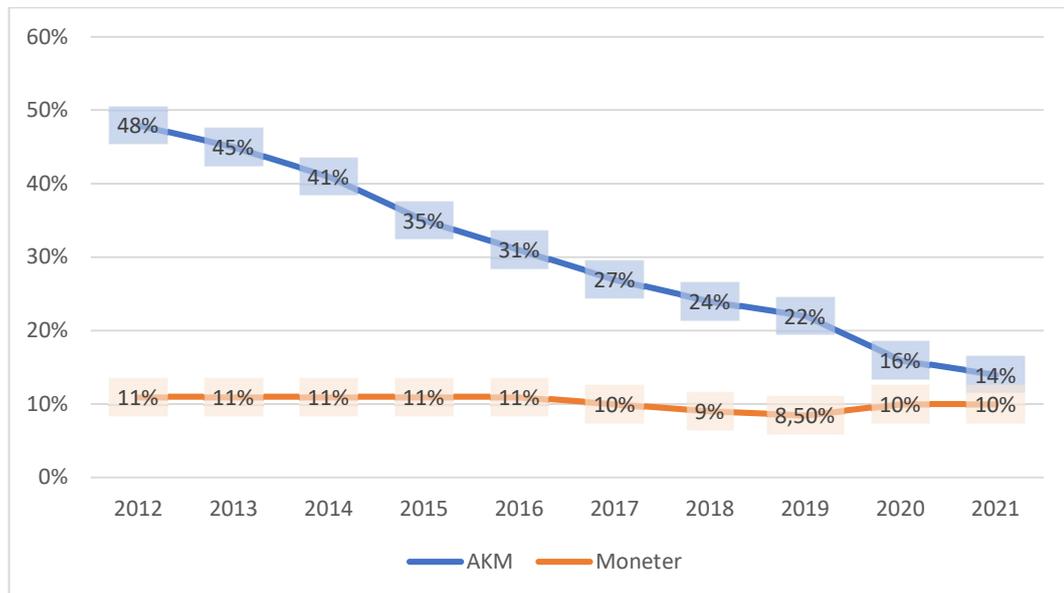
2023). IKM diharapkan dapat mengurangi bias kemiskinan yang menggunakan pendekatan hanya dari sisi pengeluaran saja, padahal bisa saja terjadi faktor di luar dari moneter sangat mempengaruhi seseorang menjadi miskin. Kemiskinan multidimensi ini dapat diumpamakan seperti penyakit, jadi seorang dokter harus menentukan dulu penyakit yang diderita seorang pasien baru dapat memberikan obatnya. Begitu pula pada penyebab kemiskinan multidimensi yang penanganannya bisa saja berbeda sesuai penyebabnya.

Tingkat kemiskinan dapat diukur melalui dua pendekatan yang berbeda yakni menggunakan pendekatan multidimensi dan pendekatan moneter. AKM (Angka Kemiskinan Multidimensi) melihat persentase populasi yang mengalami keterbatasan dalam berbagai dimensi kehidupan termasuk akses kesehatan, pendidikan, kondisi hunian, ketersediaan fasilitas dasar, standar hidup, serta aspek perlindungan dan partisipasi masyarakat (Chakravarty, 2009). Di lain pihak, BPS menggunakan pendekatan kemiskinan moneter yang mengukur proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik kemiskinan di Indonesia dapat diperoleh melalui studi perbandingan antara AKM dan angka kemiskinan moneter. Kombinasi kedua indikator ini tidak hanya membantu mengidentifikasi dampak kemiskinan pada berbagai aspek kehidupan, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Analisis data periode 2012-2021 mengungkapkan bahwa meski AKM secara konsisten lebih tinggi dibanding kemiskinan moneter nasional, kedua indikator ini menunjukkan penurunan yang berkelanjutan dan bermakna, mencerminkan kemajuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia mencatat perkembangan positif pada 2021, dimana gap antara pengukuran kemiskinan multidimensi dan moneter semakin mengecil. Sebagaimana tersaji pada gambar 1.1 tingkat AKM tercatat 14,34%, tak terpaut jauh dari angka kemiskinan moneter sebesar 9,93%. Sepanjang periode 2011-2021, penurunan AKM mencapai hampir 35%, kontras dengan kemiskinan moneter yang hanya turun sekitar 2%. Keberhasilan menurunkan AKM ini ditopang oleh membaiknya tiga indikator: penetrasi internet, tingkat kesehatan masyarakat, dan

partisipasi pendidikan. Sementara itu, pengukuran kemiskinan moneter yang terbatas pada aspek konsumsi menyebabkan analisisnya kurang komprehensif.



Gambar 1.1 Perbandingan Kemiskinan Multidimensi (AKM) dan Moneter Nasional tahun 2012-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), (2024)

Sebagai ilustrasi, Indonesia telah mencatatkan kemajuan besar dalam pembangunan sarana telekomunikasi selama satu dekade terakhir. Selama pandemi, pemerintah juga memberikan bantuan berupa paket internet kepada siswa, yang secara drastis meningkatkan akses internet (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Akibatnya, jumlah penduduk yang kekurangan akses terhadap internet berkurang secara signifikan. Hal serupa juga terlihat pada indikator lain, seperti penurunan tingkat morbiditas dan peningkatan lama sekolah, yang turut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan multidimensi. Ini menggarisbawahi bahwa upaya untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan di berbagai aspek kehidupan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan multidimensi secara menyeluruh.

Akses terhadap layanan keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari kelompok masyarakat miskin menjadi salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Kebijakan ini sejalan dengan peran vital UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian nasional melalui penciptaan kesempatan kerja, pengurangan

tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Amalina & Subiyantoro, 2024).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi lanskap bisnis Indonesia dengan jumlah mencapai 64,2 juta unit pada 2021, mewakili 99% dari seluruh unit usaha yang ada menurut catatan Kementerian Koperasi UKM. Sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia, sektor UMKM berkontribusi besar terhadap PDB dengan nilai Rp 9.580 triliun atau setara 61% dari total. Dampak positif UMKM juga terlihat dari kemampuannya menyediakan lapangan kerja, dimana 97% tenaga kerja Indonesia terserap di sektor ini (Limanseto, 2023). Peran vital UMKM dalam menjaga kestabilan dan mendorong perkembangan ekonomi nasional menjadikannya sebagai sektor prioritas yang terus dikembangkan.

Dalam menyusun kebijakan dan mengatur distribusi APBN, pemerintah menempatkan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat sebagai fokus utama. Hal ini merupakan implementasi dari mandat konstitusional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, dimana negara berkewajiban menyejahterakan kehidupan bangsa dan memberantas kemiskinan. Penyaluran pembiayaan dan fasilitas kredit ke pelaku UMKM menjadi salah satu inisiatif penting yang dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil studi, penyaluran kredit skala mikro terbukti berperan efektif dalam mendorong perbaikan kualitas hidup kelompok masyarakat kurang mampu, serta memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional (Khandker, 2005). Pada level rumah tangga, kredit mikro terbukti dapat menciptakan lapangan kerja lebih efektif dibandingkan peningkatan di sektor ekonomi lainnya. Namun, pada tingkat makroekonomi, dampak kredit mikro terhadap peningkatan produksi relatif kecil (Thanh et al., 2019). Hal ini menunjukkan pentingnya pembiayaan mikro sebagai salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi kemiskinan.

Untuk mendorong perkembangan UMKM, pemerintah menghadirkan dua program pembiayaan. Program utama adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menggunakan mekanisme penjaminan dan disalurkan lewat lembaga keuangan untuk memperluas akses modal UMKM (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Melengkapi program tersebut, Kementerian Keuangan

(2021) menjelaskan adanya pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang ditujukan bagi usaha mikro lapisan terbawah yang belum dapat mengakses KUR, dengan penyaluran melalui beragam badan usaha dan lembaga keuangan mikro.

Dukungan pembiayaan bagi UMKM juga hadir dalam bentuk kredit mikro yang dapat diakses melalui beragam lembaga, baik bank, non-bank, maupun lembaga keuangan mikro. Limanseto (2021) menyoroti kekhasan kredit mikro di Indonesia yang diperuntukkan bagi pengusaha yang secara bisnis layak (*feasible*), namun belum mampu memenuhi syarat kredit perbankan konvensional. Semua program pembiayaan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memfasilitasi akses permodalan yang lebih luas, demi mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor usaha kecil di Indonesia.

Salah satu produk kredit mikro yang hadir untuk masyarakat di pedesaan adalah Lembaga Keuangan Mikro Badan Usaha Milik Desa. BUMDes LKM (Badan Usaha Milik Desa - Lembaga Keuangan Mikro) merupakan lembaga ekonomi desa yang memadukan konsep badan usaha milik desa dengan fungsi lembaga keuangan mikro, dirancang untuk memperkuat perekonomian desa melalui penyediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat pedesaan (Salam & Marwini, 2018). Sebagai unit usaha yang dikelola oleh desa, BUMDes LKM berperan strategis dalam memobilisasi dana masyarakat, memberikan pinjaman dengan sistem yang terjangkau, serta mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah desa, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam memberdayakan UMKM melalui program kredit mikro tercermin dari besarnya alokasi dana yang disediakan. Inisiatif ini memiliki sejarah panjang, diawali dengan proyek Bimbingan Masyarakat dan Swasembada Beras di pertengahan 1970-an. Kementerian Keuangan (2021) mencatat, pada tahun 2021, pemerintah menyiapkan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp161,20 triliun untuk UMKM dan koperasi. Program ini mencakup beberapa skema seperti Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), penjaminan kredit UMKM dan korporasi, program penempatan dana pada bank umum, dan subsidi bunga pinjaman.

Subsidi bunga kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2020, yang mengatur tata cara pemberian subsidi bunga atau margin untuk kredit/pembiayaan UMKM sebagai bagian dari pelaksanaan program PEN. Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat, terutama didorong oleh pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, realisasi KUR mencapai Rp198,53 triliun, meningkat menjadi Rp283,48 triliun pada tahun 2021, dan mencapai Rp365,96 triliun pada tahun 2023. Di wilayah pedesaan, badan usaha milik desa (BUMDes) juga memainkan peran penting sebagai lembaga keuangan mikro. Dengan dukungan anggaran dari APBDesa yang disalurkan pemerintah pusat setiap tahun, BUMDes berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan dan pembangunan desa, sehingga mendukung pengembangan UMKM di tingkat lokal.

Program kredit mikro tidak selamanya dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kondisi kemiskinan yang terjadi pada masyarakat miskin. Program kredit mikro yang awalnya bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan, justru dapat membuat tingkat kemiskinan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan mikro di beberapa negara afrika (Chikwira et al., 2022). Beberapa studi juga menemukan tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan karena kurangnya Pendidikan, keterampilan dan pengalaman pada kelompok sasaran penerima pinjaman. Kredit mikro memberikan dampak yang berbeda yang dipengaruhi oleh lokasi perdesaaan atau perkotaan, perilaku peminjam terhadap kredit, kohesi kelompok, pengembangan usaha, literasi keuangan dan penyedia layanan keuangan (Armendáriz et al., 2010).

Penelitian mengenai dampak penyaluran kredit mikro terhadap kemiskinan multidimensi memiliki urgensi tinggi, dimana bagi pemerintah hal ini dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan inklusi keuangan dan pengalokasian sumber daya yang tepat sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan yang komprehensif. Program kredit mikro yang telah menyerap anggaran signifikan perlu diuji efektivitasnya tidak hanya dari sisi peningkatan pendapatan, tetapi juga dampaknya terhadap dimensi kemiskinan lain seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup. Hasil penelitian dapat menjadi landasan pengambilan keputusan

berbasis bukti untuk mereformulasi kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih terintegrasi.

Dari sisi akademisi penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan tentang efektivitas intervensi keuangan mikro yang selama ini lebih banyak diukur dari indikator moneter semata, serta membuka peluang pengembangan kerangka teoretis baru yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan kultural dalam memahami dinamika kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat relevan mengingat perdebatan akademis tentang efektivitas kredit mikro yang masih berlangsung, dengan hasil-hasil penelitian yang sering kali kontradiktif di berbagai konteks dan wilayah geografis. Melalui pendekatan multidimensi, penelitian ini dapat melampaui paradigma konvensional dan menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang kemiskinan sebagai fenomena yang kompleks. Implikasinya dapat mencakup penyempurnaan metodologi evaluasi program pembangunan, penguatan kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan komunitas lokal, serta perumusan indikator keberhasilan program yang lebih komprehensif. Pada akhirnya, penelitian semacam ini berpotensi membangun jembatan antara teori dan praktik dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pendekatan pengukuran kemiskinan multidimensi memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan moneter, karena mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Penelitian sebelumnya mengenai dampak program kredit mikro terhadap pengentasan kemiskinan menunjukkan hasil yang beragam, baik positif maupun negatif. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis dampak program kredit mikro terhadap pengentasan kemiskinan menggunakan pendekatan kemiskinan multidimensi dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Evaluasi pengaruh kredit mikro terhadap dimensi-dimensi kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan, mengingat adanya variasi temuan dari studi-studi terdahulu dan kebutuhan akan analisis yang menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana dampak dari adanya kredit mikro terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana dampak pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia?
2. Bagaimana dampak pemberian kredit Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes LKM) terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia?
3. Bagaimana dampak pemberian kredit mikro terhadap kemiskinan multidimensi pelaku usaha di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian pada bagian latar belakang maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis seberapa besar dampak pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia.
2. Menganalisis seberapa besar dampak kredit Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes LKM) terhadap pengentasan kemiskinan multidimensi di Indonesia.
3. Menganalisis seberapa besar dampak pemberian kredit mikro terhadap kemiskinan multidimensi pelaku usaha di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diproyeksikan dapat mencapai tiga manfaat penting. Manfaat pertama adalah menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi antara kemiskinan multidimensi dan program kredit mikro. Manfaat kedua adalah menyajikan informasi yang membantu mengidentifikasi program kredit mikro yang paling efektif dalam menangani kemiskinan multidimensi di Indonesia. Manfaat ketiga adalah menyediakan basis pengetahuan bagi peneliti dan institusi untuk mengembangkan kajian di masa mendatang dengan beragam metode statistik yang lebih mendalam, guna memperkaya pemahaman tentang pengaruh kredit mikro dalam mengurangi kemiskinan di berbagai aspek kehidupan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan kajian yang mencakup aspek-aspek esensial. Dalam hal sumber data, studi ini menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi

Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan pada Maret 2022, sedangkan objek pengamatannya adalah para kepala rumah tangga yang mendapatkan kredit mikro.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembatasan masalah maka penelitian ini disusun secara sistematis. Sistem penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi sebagai latar belakang penelitian, perumusan permasalahan, tinjauan dari penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan system penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan konsep dasar dan penelitian sebelumnya yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian serta merumuskan kerangka pemikiran konseptual.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian terutama variabel yang digunakan, sumber data serta proses pengolahan data dan analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian. Pada bab ini dijelaskan gambaran umum penelitian dan merumuskan kebijakan yang dapat dilakukan dari penelitian ini.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi uraian kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.